

Dampak Transmisi Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara

Yusri¹, Chairina², Rifdah Riyan Dara³

^{1,2}STIE Graha Kirana, Indonesia

³ Universitas IBBI, Indonesia

¹yusrish@gmail.com, ²chairinanst68@gmail.com, ³rifdahriyand@gmail.com

*rifdahriyand@gmail.com

Received: 03 Februari 2023; Revised: 27 Februari 2023; Accepted: 02 Maret 2023

Abstrak

Indonesia menganut pada sistem moneter ganda yaitu menggunakan sistem moneter konvensional dan syariah. Agar kebijakan moneter dapat mencapai tujuan, maka dibutuhkan mekanisme jalur yang disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh instrumen transmisi kebijakan moneter konvensional (dalam hal ini berupa kredit atau pinjaman dan suku bunga) dan instrumen transmisi kebijakan moneter syariah (dalam hal ini berupa pembiayaan syariah dan bagi hasil) terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data time series bulanan dengan periode tahun 2015 sampai 2021 yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, OJK dan Badan Pusat Statistik melalui website resmi. Teknik analisis data menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan Eviews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transmisi kebijakan moneter konvensional (kredit atau pinjaman (LOAN) dan suku bunga (INT)) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Transmisi kebijakan moneter syariah (pembiayaan syariah (FINC) dan profit loss sharing (PLS)) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Secara parsial, kredit atau simpanan (LOAN), suku bunga (INT) dan tingkat bagi hasil (PLS) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Sedangkan pembiayaan syariah (FINC) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Kata Kunci: kredit/pinjaman, suku bunga, pembiayaan syariah, tingkat bagi hasil, pertumbuhan ekonomi

Abstract

Indonesia adheres to a dual monetary system, namely using conventional and sharia monetary systems. In order for monetary policy to achieve its goals, a pathway mechanism is needed known as the monetary policy transmission mechanism. For this reason, this study aims to obtain empirical evidence of the influence of conventional monetary policy transmission instruments (in this case in the form of credit or loans and interest rates) and Islamic monetary policy transmission instruments (in this case in the form of Islamic financing and profit sharing) on economic growth in North Sumatra. The type of data used in this study is secondary data in the form of monthly time series data for the period 2015 to 2021 published by Bank Indonesia, OJK and the Central Bureau of Statistics through the official website. The data analysis technique uses a multiple linear regression analysis model with Eviews. The results of the study show that the transmission of conventional monetary policy (loans or loans (LOAN) and interest rates (INT)) has an effect on economic growth in North Sumatra. Sharia monetary policy transmission (Islamic financing (FINC) and profit loss sharing (PLS)) has an effect on economic growth in North Sumatra. Partially, credit or deposits (LOAN), interest rates (INT) and profit sharing rates (PLS) have a positive effect on economic growth in North Sumatra. Meanwhile, sharia financing (FINC) has a negative effect on economic growth in North Sumatra.

Keywords : credit/loans, interest rates, sharia financing, profit sharing rates, economic growth

PENDAHULUAN

Pulau Sumatera adalah pulau keenam terbesar di dunia yang terletak di Indonesia. Pulau Sumatera menjadi sumber pertumbuhan ekonomi setelah Pulau Jawa (Siti Ombun Harahap & Harahap, 2018). Pulau Sumatera memiliki 10 provinsi didalamnya dengan potensi alam dan penggunaan teknologi yang berbeda-beda (Andhiani, et al, 2018). Salah satunya provinsi Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara telah banyak melakukan pembangunan infrastruktur, namun apakah pertumbuhan telah inklusif dan bagaimana efek dari pembangunan di Provinsi Sumatera Utara (Panjaitan, et al, 2020).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sumatera Utara mengalami kontraksi sebesar 1,07%. Hal ini menyebabkan perekonomian Sumatera Utara tidak stabil. Perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19. Semenjak Covid-19, pemulihan ekonomi Sumatera Utara diyakini tetap berlanjut karena BI juga mendukung dengan berbagai kebijakan dan program. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di Sumut seharusnya inflasi harus bisa ditekan. Di tahun 2022, inflasi Sumut diperkirakan akan lebih tinggi dari tahun 2021(Siregar, 2022). Ditengah pandemi covid-19, perekonomian di Sumatera Utara pada tahun 2020 tergolong tidak lebih baik dibanding dengan pencapaian tahun 2019(Yudhistira K et al., 2020). Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), perbaikan perekonomian mulai terjadi setelah sekitar dua tahun dilanda pandemi Covid-19. Dan menurut BPS pertumbuhan Sumatera Utara masih tercatat diatas sejumlah provinsi lainnya yang ada di Sumatera. Sumatera Utara mulai menunjukkan pertumbuhan positif. Akan tetapi, lajunya belum menyentuh pertumbuhan di masa pra-pandemi (Batubara, 2022).

Kebijakan pemerintah ditempuh untuk memulihkan kestabilan ekonomi sehingga didapatkan perkembangan nilai tukar rupiah yang menguat dan menunjukkan kestabilan dalam beberapa tahun belakang ini. Pemerintah juga menggunakan kebijakan moneter untuk menjaga kestabilan perekonomian. Kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah yaitu dengan cara mengendalikan tingkat suku bung (*interest rates*).

Kebijakan moneter merupakan usaha yang dilakukan dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar bisa berjalan sesuai yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar didalam perekonomian. Definisi lain juga menyatakan kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang suatu negara, biasanya otoritas moneter dipegang oleh bank sentral suatu negara.(Hubara et al., 2021:465). Indonesia menganut pada sistem moneter ganda yaitu menggunakan sistem moneter konvensional dan syariah yang penetapannya sejak dikeluarkan UU No. 10 tahun 1998. Berdasarkan Undang-undang ini, *dual monetary system* yang mengakomodir secara paralel antara system perbankan konvensional dengan sistem perbankan syariah yang tidak menggunakan suku bunga dalam operasionalnya (Manan, 2014:219). Sistem moneter konvensional lebih mengutamakan pada sektor *financial* (keuangan) yang beroperasi pada pemberlakuan adanya suku bunga. Pada sistem moneter syariah lebih mengutamakan pada sektor riil, dengan tidak diberlakukan adanya jaminan, suku bunga ataupun riba. Hal ini berdasarkan peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia nomor 16/12/PBI/2014 tanggal 24 Juli 2014. Salah satu cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah adalah dengan pelaksanaan operasi moneter syariah untuk mempengaruhi kecukupan likuiditas perbankan syariah (Soemitra, 2017:211).

Namun kelemahan dari Undang-undang No. 10 Tahun 1998 ini, belum secara jelas memperlihatkan bagaimana operasional perbankan syariah yang seharusnya. Tetapi dengan adanya undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat dalam penerapan bank syariah dan kemudian kedudukannya didukung dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Kalsum, 2016:15).

Agar kebijakan moneter dapat mencapai tujuan, maka dibutuhkan mekanisme jalur yang disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi adalah saluran yang menghubungkan antara kebijakan moneter dengan perekonomian. Mekanisme transmisi kebijakan moneter didefinisikan sebagai jalur yang dilalui oleh sebuah kebijakan moneter untuk mempengaruhi kondisi perekonomian, terutama pendapatan nasional dan laju perubahan harga, konsep dasar mekanisme transmisi kebijakan moneter dimulaidari instrumen kebijakan yang mempengaruhi sasaran operasional, sasaran antara dan sasaran akhir.

Transmisi kebijakan moneter berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan keuangan melalui berbagai jalur seperti jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Sehingga, pemahaman tentang transmisi kebijakan moneter menjadi kunci agar dapat mengarahkan kebijakan moneter untuk mempengaruhi arah perkembangan ekonomi riil dan harga di masa yang akan datang (Ascarya, 2012:284). Dengan demikian, kebijakan moneter sangat mempengaruhi berbagai unsur penting dalam pertumbuhan ekonomi (Prihatin, Arintoko, & Siharno, 2019).

Dengan adanya *dual monetary system* maka mekanisme transmisi kebijakan moneter semakin berkembang dan kompleks. UU No.3 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Bank Indonesia diberi amanah sebagai otoritas moneter ganda yang dapat menjalankan kebijakan moneter konvensional maupun syariah.(Ascarya & Bayuni, 2010). Maka dari itu isu mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah menjadi sangat penting. Dalam sistem ekonomi syariah yang dikenal bukanlah sistem suku bunga (INT) melainkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*). Besar kecilnya pembagian keuntungan tergantung pada kegiatan investasi dan pembiayaan yang dilakukan di sektor riil. Hasil dari investasi dan pembiayaan yang dilakukan bank disektor riil yang menentukan besar kecilnya pembagian keuntungan di sektor moneter. Ini berarti sektor moneter bergantung pada sektor riil.

Berhubung dengan itu, pada transmisi kebijakan moneter syariah jalur yang digunakan tetap mengacu pada prinsip syariah yaitu menggunakan jalur pembiayaan. Dengan begitu sistem moneter ganda ini lebih disebut dengan *policy rate*. Namun demikian, mengenai jalur transmisi kebijakan moneter lainnya, seperti jalur bagi hasil, jalur harga aset, jalur nilai tukar, jalur ekspektasi inflasi masih tetap diperlukan.

Saat ini perkembangan perbankan konvensional dengan perbankan syariah memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, apalagi dalam pertumbuhan perekonomian sektor riil. Diperlukan transmisi kebijakan moneter konvensional dan syariah untuk meningkatkan perekonomian sektor riil. Bisa kita lihat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara dalam 7 tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat tajam karena Covid-19 melanda dan di tahun sebelumnya juga mengalami fluktuatif. Dari sini peneliti ingin melihat

bagaimana pengaruh dari kedua sistem tersebut, mana yang lebih efektif dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Orang sering kali mencampuradukkan pengertian pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi, padahal kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Pengertian pembangunan itu lebih luas dan kompleks dari pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya mencakup aspek materi saja. Sedangkan pembangunan mencakup aspek materi dan non materi (Halim, 2018). Menurut Sukirno (2014), pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilandaskan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan melalui pengendalian jumlah uang beredar atau suku bunga (Kunawangsih Pracoyo & Pracoyo, 2007). Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Hal ini disebabkan karena sektor moneter lebih cepat memberikan keuntungan dari pada sektor riil (Latifah, 2015:124). Kebijakan moneter juga dapat diartikan sebagai kebijakan dari otoritas moneter (bank sentral) dalam bentuk pengendalian agregat moneter (seperti uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan) untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan dicerminkan oleh stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang tersedia. Proses itu sendiri didefinisikan sebagai reaksi ekonomi terhadap perubahan kebijakan moneter, dimulai dengan perubahan instrumen kebijakan dan diakhiri dengan penyesuaian penuh ekonomi terhadap kebijakan moneter (Budiyanto & Wibowo, 2021). Agar kebijakan moneter dapat mencapai tujuan, maka dibutuhkan mekanisme jalur yang disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi adalah saluran yang menghubungkan antara kebijakan moneter dengan perekonomian.

Transmisi kebijakan moneter dari perspektif konvensional dapat melalui jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Dengan digunakannya instrument suku bunga dalam rezim moneter *inflation targeting*, transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga (*interest rate pass-through*) menjadi salah satu topik bahasan penting (Ascarya, 2012). Model *interest rate pass-through* telah dikembangkan sejak lama, seperti model yang dikembangkan oleh Rouseas (1985) yang disebut model *marginal cost pricing* yang menyatakan bahwa perubahan suku bunga *cost of funds* bank akan diteruskan dalam bentuk perubahan suku bunga bank kepada nasabahnya, karena hal ini mencerminkan perubahan *marginal cost* dari bank. Model ini masih dianggap sebagai model terbaik untuk menjelaskan *interest rate pass-through* dari suku bunga kebijakan ke suku bunga perbankan (Ascarya, 2012).

Di masa dominasi ekonomi konvensional dengan uang kertas dan bank sentralnya sampai saat ini, ekonomi Islam berkembang di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim di tengah system uang kertas dan bank sentral. Oleh karena itu, berkembang pula sistem moneter Islam dengan kebijakannya dan proses transmisinya. Salah satu pionir pengembang teori ekonomi moneter Islam

kontemporer adalah Muhammad Umer Chapra dengan bukunya *Towards a Just Monetary System* tahun 1985.

Setting institusi keuangan Islam kontemporer tidak jauh berbeda dengan setting institusi keuangan konvensional yang sudah *established*, sehingga instrument-instrumen kebijakan moneter Islam juga banyak yang mirip dengan instrument-instrumen kebijakan moneter konvensional. Namun, karena cara kerja instrument kebijakan moneter Islam memiliki persamaan dan perbedaan prinsip dengan cara kerja instrument kebijakan moneter konvensional, transmisi kebijakan moneter Islam dapat sama atau berbeda dengan transmisi kebijakan moneter konvensional. Chapra (1985) tidak mendiskusikan secara spesifik masalah transmisi kebijakan moneter Islam ini (Chapra, 1985). Namun demikian, beberapa studi empiris mulai bermunculan untuk melihat adanya transmisi kebijakan moneter Islam dengan karakteristiknya. Sukmana dan Kassim (2010) merupakan upaya awal untuk mengetahui adanya transmisi kebijakan moneter pada jalur pembiayaan melalui perbankan Syariah Malaysia ke pertumbuhan ekonomi (Sukmana & Kassim, 2010; Ascarya, 2012).

Besarnya pengaruh kebijakan moneter terhadap berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan yang ditempuh bank sentral dalam mencapai tujuan akhir tidak lain ialah untuk menstabilkan harga dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi. Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan moneter berpengaruh pada perputaran uang dalam ekonomi, yang tercermin pada perkembangan jumlah uang beredar, suku bunga, kredit, nilai tukar, serta berbagai variabel ekonomi dan keuangan lainnya (Warijiyo & Solikin, 2004). Bagi Indonesia, pemahaman mengenai mekanisme transmisi moneter sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, hal ini diperlukan guna mendukung proses pemulihan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dari faktor produksi secara terus menerus yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Tercapainya pertumbuhan ekonomi sesuai yang diharapkan tentu tidak lain juga dipengaruhi adanya kebijakan moneter baik dalam kebijakan moneter konvensional maupun kebijakan moneter Islam yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dari uang (baik secara internal maupun eksternal). Stabilitas dalam nilai uang ini tidak terlepas dari tujuan ketulus dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia.

Pengaruh kebijakan moneter terhadap perkembangan ekonomi dan perubahan kegiatan ekonomi secara umum bergantung pada implementasi kebijakan moneter dan kemandirian bank sentral dalam memilih alat moneter yang tepat untuk merumuskan kebijakan moneter dalam tujuan makroekonomi. Dalam era globalisasi saat ini, dimana peristiwa keuangan negara lain sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian suatu negara, faktor eksternal akan mempengaruhi pemerintah dalam menentukan kebijakan, baik kebijakan fiskal maupun moneter, mengemukakan bahwa bisnis keuangan merupakan bagian integral dari suatu perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi tidak dapat dianalisis tanpa melibatkan masalah moneter (Budiyanto & Wibowo, 2021). Kebijakan moneter dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang (Tambunan & Nawawi, 2017). Hipotesis yang kami kembangkan adalah:

H₁: Kredit dan pinjaman (LOAN) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

H₂: Suku bunga (INT) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

H₃: Kredit atau Pinjaman (LOAN) dan Suku Bunga (INT) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

H₄: Pembiayaan syariah (FINC) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

H₅: Tingkat Bagi hasil (PLS) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara
H₆: Pembiayaan Syariah (FINC) dan Tingkat Bagi Hasil (PLS) terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

H₇: Kredit atau Pinjaman (LOAN), Suku Bunga (INT), Pembiayaan Syariah (FINC) dan Tingkat Bagi Hasil (PLS) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

METODE

Sampel dalam penelitian ini menggunakan data LOAN, INT, FINC, PLS dan pertumbuhan ekonomi. Keseluruhan data variabel tersebut diambil mulai dari tahun 2015 sampai 2021 dengan data laporan publikasi bulanan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), data tersebut berjumlah 7 (tahun) x 12 bulan dengan jumlah total 84 data sampel penelitian.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yakni data yang diperoleh secara tidak langsung. Serta merupakan data runtun waktu atau *time series* tahunan dengan periode 2015-2021 yaitu data yang berbentuk angka-angka dan sumbernya diperoleh data yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa keuangan (OJK).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan bantuan perhitungan statistik yaitu penerapan Eviews. Persamaan analisis regresi berganda dapat ditulis sebagai berikut:

$$PE = \alpha + \beta_1 LOAN + \beta_2 INT + \beta_3 FINC + \beta_4 PLS + e.$$

Keterangan :

PE: Pertumbuhan Ekonomi

LOAN: Kredit bank konvensional

INT: Suku bunga

FINC: Pembiayaan bank syariah

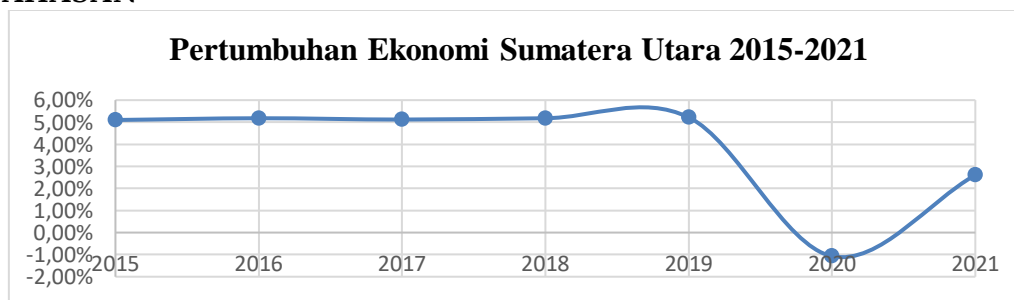
PLS: Tingkat bagi hasil bank syariah

e; error

α ; konstanta

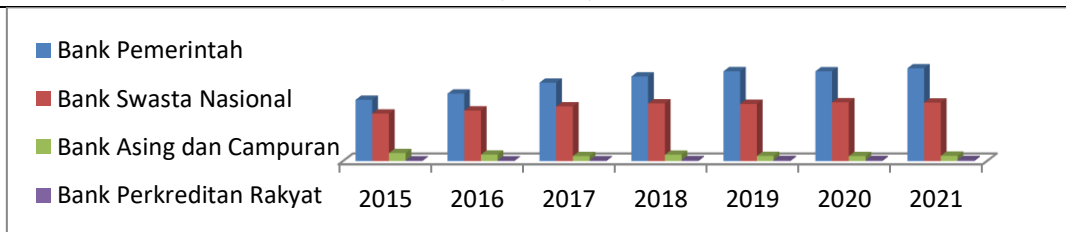
β ; koefisien regresi

PEMBAHASAN



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2015-2021

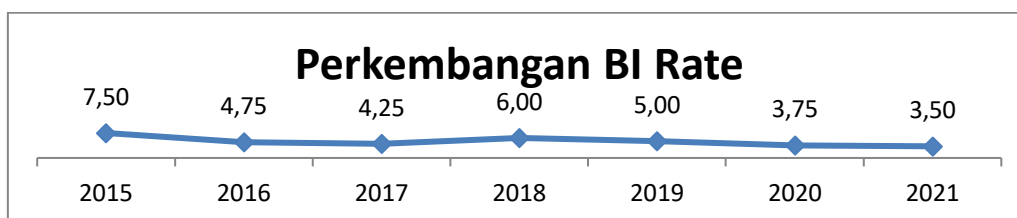
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuatif, hal ini dapat dilihat pada gambar 1. Secara umum kinerja ekonomi tahun 2021 menunjukkan pergerakan melambat dibandingkan tahun 2015.



Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (Sumut dan Aceh) (2022)

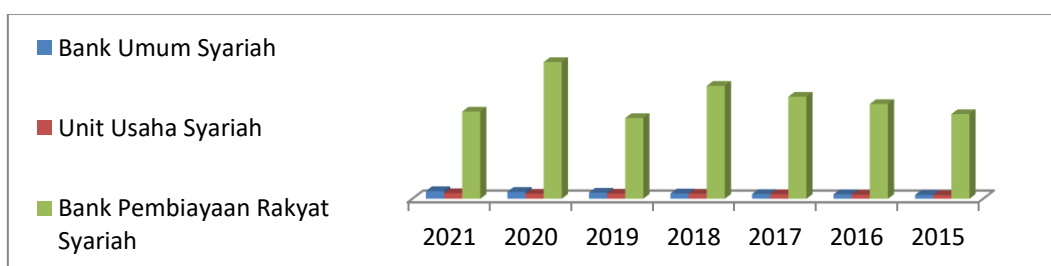
Gambar 2. Perkembangan Kredit Perbankan Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR menurut Kelompok Bank di Provinsi Sumatera Utara (miliar rupiah)

Gambar 2 menunjukkan bahwa kinerja perbankan dalam penyaluran kredit dari tahun 2015 sampai tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan. Bank pemerintah mendominasi penyaluran kredit di Provinsi Sumatera Utara di bandingkan bank swasta nasional, bank asing dan campuran bank bank perkeditan rakyat. Peningkatan penyaluran kredit ini didorong oleh kredit rumah tangga, seiring dengan membaiknya ekspektasi masyarakat dan aktivitas dunia usaha yang kembali pulih pasca pandemi covid 19. Penyaluran kredit rumah tangga meningkat terutama di dorong oleh kredit multiguna dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), selanjutnya pertumbuhan kredit juga terindikasi pada penyaluran kredit korporasi pada seluruh lapangan usaha utama di Sumatera Utara.



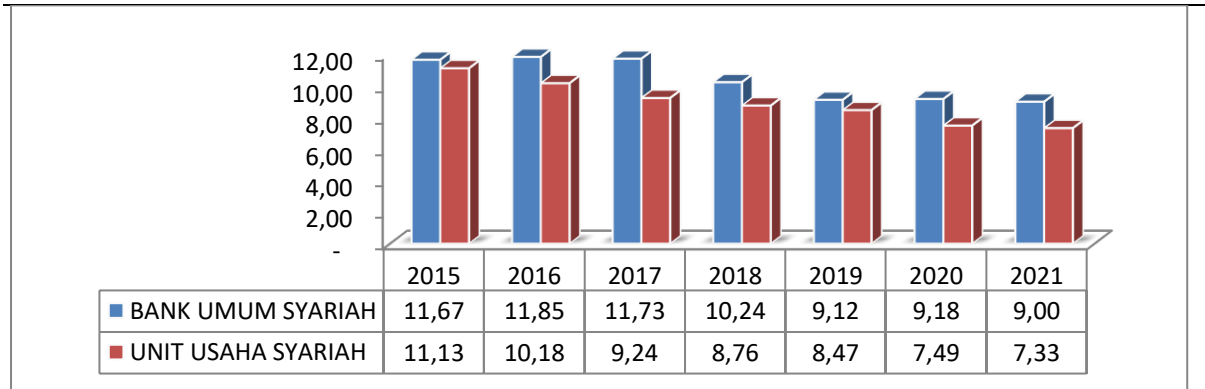
Gambar 3. Perkembangan BI Rate

Pada gambar 3 menunjukkan BI rate dari tahun 2015 sampai tahun 2021 terus cenderung menurun. Mulai 7,5% di tahun 2015 turun menjadi 3,50% di tahun 2021. Hal ini disebabkan karena keputusan Bank Indonesia sebagai tindak lanjut sinergi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam paket kebijakan terpadu untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi.



Gambar 4. Perkembangan Pembiayaan Syariah di Sumatera Utara tahun 2015 sampai tahun 2021 (dalam Miliar Rupiah)

Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa perkembangan pembiayaan syariah di Sumatera Utara cenderung mengalami kenaikan. Dari Rp. 98.129,66 miliar di tahun 2015 menjadi Rp. 106.830,62 miliar di tahun 2021. Sebagian besar pembiayaan syariah di dominasi oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.



Gambar 5. Perkembangan *Profit Loss Sharing* (PLS) di Sumatera Utara tahun 2015 sampai tahun 2021

Pada gambar 5 menunjukkan bahwa perkembangan *profit loss sharing* (PLS) atau bagi hasil pembiayaan (Mudharabah+Musyarakah) terus mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Perkembangan *profit loss sharing* di Sumatera Utara di bagi menjadi 2 (dua) perbankan syariah yaitu bank umum syariah dan unit usaha syariah. Unit usaha syariah mengalami penurunan yang sangat tajam dibandingkan dengan bank umum syariah. Penurunan yang terjadi ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan tingkat Pembiayaan Perbankan Syariah pada setiap tahunnya. Peningkatan tersebut dikarenakan suatu hal yaitu pembiayaan perbankan syariah merupakan rate yang dapat mempengaruhi peningkatan pada *profit loss sharing* atau tingkat bagi hasil (Mudharabah+Musyarakah).

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 1. Hasil Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOAN	0.200043	0.009521	21.01119	0.0000
INT	0.296484	0.052602	5.636383	0.0000
FINC	-6.99E-05	2.58E-06	27.06605	0.0000
PLS	0.019620	0.000837	23.42831	0.0000
C	69.42699	3.604582	19.26076	0.0000
R-squared	0.959009	Mean dependent var		3.905952
Adjusted R-squared	0.956933	S.D. dependent var		2.458571
S.E. of regression	0.510215	Akaike info criterion		1.549710
Sum squared resid	20.56523	Schwarz criterion		1.694401
Log likelihood	-60.08781	Hannan-Quinn criter.		1.607874
F-statistic	462.0617	Durbin-Watson stat		0.092286
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: data diolah (2022)

Nilai R^2 (*R-Square*) pada penelitian ini adalah sebesar 0,9590. Dari nilai tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebesar 95,90% dari variabel dependen yaitu PDRB dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen yaitu LOAN, INT, FINC dan PLS, sedangkan 4,10% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti pada penelitian ini. Semakin banyak variabel bebas yang digunakan, maka akan semakin besar nilai *R-Square* yang diperoleh.

Berdasarkan pada tabel 1. dapat diketahui bahwa: (1) Nilai probabilitas dari LOAN adalah sebesar $0,0000 <$ (lebih kecil) dari 0,05 atau $t_{hitung} (21,01119) >$ (lebih besar) dari $t_{tabel} (1,99045)$, maka dapat disimpulkan

bahwa H01 tolak dan Ha1 diterima. Artinya kredit atau pinjaman berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. (2) Nilai probabilitas dari INT adalah sebesar $0,0000 < (\text{lebih kecil}) < 0,05$ atau $t_{hitung} (5,636383) > (\text{lebih besar}) > t_{tabel} (1,99045)$, maka dapat disimpulkan bahwa H02 ditolak dan Ha2 diterima. Artinya suku bunga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. (3) Nilai probabilitas dari FINC adalah sebesar $0,0000 < (\text{lebih kecil}) < 0,05$ atau $t_{hitung} (27,06605) > (\text{lebih besar}) > t_{tabel} (1,99045)$, maka dapat disimpulkan bahwa H04 ditolak dan Ha4 diterima. Artinya pembiayaan syariah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. (4) Nilai probabilitas dari PLS adalah sebesar $0,0000 < (\text{lebih kecil}) < 0,05$ atau $t_{hitung} (23,42831) > (\text{lebih besar}) > t_{tabel} (1,99045)$, maka dapat disimpulkan bahwa H05 ditolak dan Ha5 diterima. Artinya tingkat bagi hasil (*profit loss sharing* (PLS)) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Nilai F_{tabel} adalah sebesar 2,49. Berdasarkan tabel 1, nilai probabilitas *F-statistic* sebesar 0,000000. Angka tersebut $< (\text{lebih kecil}) < 0,05$ atau *F-statistic* (462,0617) $> (\text{lebih besar}) > F_{tabel} (2,49)$, sehingga H07 ditolak dan Ha7 diterima, yang menunjukkan bahwa variabel Kredit atau Pinjaman (LOAN), Suku Bunga (INT), Pembiayaan Syariah (FINC) dan Tingkat Bagi Hasil (PLS) secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Instrumen transmisi kebijakan moneter konvensional diantaranya ada suku bunga (INT) dan kredit atau pinjaman (LOAN). Sedangkan instrumen transmisi kebijakan moneter syariah, instrumen yang digunakan adalah pembiayaan syariah (FINC) dan *Profit Loss Sharing* (PLS). Untuk menguji kedua instrumen transmisi kebijakan moneter konvensional dan syariah dapat di gambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Hasil Uji Transmisi Kebijakan Moneter Konvensional

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOAN	4.37E-06	7.21E-06	0.605605	0.5465
INT	0.924405	0.187738	4.923917	0.0000
C	-1.583698	2.074090	-0.763563	0.4473
R-squared	0.249123	Mean dependent var		3.905952
Adjusted R-squared	0.230583	S.D. dependent var		2.458571
S.E. of regression	2.156571	Akaike info criterion		4.409977
Sum squared resid	376.7148	Schwarz criterion		4.496792
Log likelihood	-182.2190	Hannan-Quinn criter.		4.444876
F-statistic	13.43691	Durbin-Watson stat		0.059583
Prob(F-statistic)	0.000009			

Sumber: data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.10 nilai probabilitas *F-statistic* sebesar 0,000009. Angka tersebut $< (\text{lebih kecil}) < 0,05$ atau *F-statistic* (13,43691) $> (\text{lebih besar}) > F_{tabel} (2,49)$, sehingga H03 ditolak dan Ha3 diterima, yang menunjukkan bahwa variabel transmisi kebijakan moneter konvensional (kredit atau pinjaman (LOAN) dan suku bunga (INT)) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Tabel 3. Hasil Uji Transmisi Kebijakan Moneter Syariah

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
FINC	-6.94E-05	6.47E-06	-10.72032	0.0000
PLS	0.358375	0.061762	5.802493	0.0000
C	5.102053	1.622253	3.145041	0.0023
R-squared	0.726280	Mean dependent var		3.905952
Adjusted R-squared	0.719522	S.D. dependent var		2.458571
S.E. of regression	1.302064	Akaike info criterion		3.400840
Sum squared resid	137.3251	Schwarz criterion		3.487655
Log likelihood	-139.8353	Hannan-Quinn criter.		3.435739
F-statistic	107.4615	Durbin-Watson stat		0.016669
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 3 nilai probabilitas *F-statistic* sebesar 0,000000. Angka tersebut < (lebih kecil) dari 0,05 atau *F-statistic* (107,4615) > (lebih besar) dari F_{tabel} (2,49), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, yang menunjukkan bahwa variabel transmisi kebijakan moneter syariah (pembiayaan syariah (FINC) dan *profit loss sharing* (PLS)) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Pengaruh kredit dan simpanan (LOAN) terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara

Dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kredit dan simpanan (LOAN) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara yang ditunjukkan dengan hasil uji t. Koefisien dari variabel kredit dan simpanan (LOAN) yang terdapat pada tabel 4.10 sebesar 0,20 yakni bernilai positif. Artinya arah hubungan kredit dan simpanan (LOAN) terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) adalah positif. Hal ini menggambarkan bahwa jika kredit dan simpanan (LOAN) meningkat sebanyak 1 satuan maka pertumbuhan ekonomi (PDRB) akan meningkat sebesar 0,020 kali.

Menurut teori Solow-Swan dalam teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa akumulasi modal atau tabungan berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi disuatu daerah/negara. Teori ini memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi dan *output* saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Tabungan yang lebih tinggi mengarah ke pertumbuhan yang lebih cepat tetapi hanya sementara. Kenaikan dalam tingkat tabungan meningkatkan pertumbuhan sampai perekonomian mencapai kondisi mapan baru. Jika perekonomian memelihara tingkat tabungan tingginya, sekaligus perekonomian itu menjaga persediaan modal yang besar dan tingkat output tinggi tetapi tidak dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi selamanya (Dwiastuti, 2020).

Hal ini didukung dari data perkembangan penyaluran kredit dan pinjaman perbankan di Sumatera Utara yang mengalami peningkatan jumlah kredit perbankan dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Peningkatan penyaluran kredit ini didorong oleh kredit rumah tangga, seiring dengan membaiknya ekspektasi masyarakat dan aktivitas dunia usaha yang kembali pulih pasca pandemi covid 19. Penyaluran kredit rumah tangga meningkat terutama di dorong oleh kredit multiguna dan

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), selanjutnya pertumbuhan kredit juga terindikasi pada penyaluran kredit korporasi pada seluruh lapangan usaha utama di Sumatera Utara.

Hal ini didukung oleh laporan Otoritas Jasa Keuangan (2015) yang menyimpulkan bahwa terjadi hubungan positif antara kredit dan pertumbuhan ekonomi (tanpa mempertimbangkan efek kapan terjadinya hubungan positif tersebut) serta memberikan sumbangan informasi yang relatif signifikan terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi, baik perubahan yang sifatnya naik atau turun. Laporan ini juga menyimpulkan bahwa hubungan dapat bersifat positif di beberapa periode, tetapi dapat berubah negatif pada periode lainnya. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghofur Wibowo dan Ahmad Mubarak (2017) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisa efektifitas mekanisme transmisi ganda. Dengan hasil uji yang diperoleh total kredit sebagai instrumen moneter di Indonesia tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena banyaknya guncangan yang terjadi pada total kredit. Dalam penelitiannya diperoleh hasil bahwa total kredit tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh suku bunga (INT) terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara

Dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa suku bunga (INT) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara yang ditunjukkan dengan hasil uji t. Koefisien dari variabel suku bunga (INT) yang terdapat pada tabel 1. sebesar 0,29 yakni bernilai positif. Artinya arah hubungan suku bunga (INT) terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) adalah positif. Hal ini menggambarkan bahwa jika suku bunga (INT) meningkat sebanyak 1 satuan maka pertumbuhan ekonomi (PDRB) akan meningkat sebesar 0,020 kali.

Menurut teori, suku bunga kredit berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Schumpeter menyatakan makin tinggi tingkat kemajuan suatu ekonomi semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi, maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi bertambah lambat jadinya. Pada akhirnya akan tercapai tingkat "keadaan tidak berkembang atau *"stationary state"*. Schumpeter memulai analisisnya dengan memisalkan bahwa perekonomian sedang dalam tidak berkembang, tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama. Pada waktu keadaan tersebut berlaku, segolongan pengusaha menyadari tentang berbagai kemungkinan untuk mengadakan inovasi yang menguntungkan. (Sukirno, 2019). Teori Keynes menjelaskan tingkat bunga merupakan suatu fenomena moneter. Artinya, tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan uang (ditentukan dalam pasar uang). Uang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi (GNP), sepanjang uang ini mempengaruhi tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga selanjutnya akan mempengaruhi keinginan untuk mengadakan investasi dengan demikian akan mempengaruhi GNP. Keynes mengasumsikan bahwa perekonomian belum mencapai *full employment*. Oleh karena itu, produksi masih dapat ditingkatkan tanpa mengubah tingkat upah maupun tingkat harga. Dengan menurunkan tingkat bunga, investasi dapat dirangsang untuk meningkatkan produk nasional. Dengan demikian setidaknya untuk jangka pendek, kebijaksanaan moneter dalam teori Keynes berperan untuk meningkatkan produk nasional pasar dana pinjaman. (Nopirin, 2014)

Hal ini didukung dari data perkembangan suku bunga acuan yang mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Hal ini disebabkan karena keputusan Bank Indonesia sebagai tindak lanjut sinergi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam paket kebijakan terpadu

untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi. Namun penurunan suku bunga acuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia belum mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara justru mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Hal ini dipicu oleh pandemi covid19.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lee & Werner (2022) yang menyimpulkan bahwa (1) korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga tidak negatif tetapi positif di hampir semua negara yang diteliti selama sebagian besar periode waktu, dan; (2) bila signifikan, sebagian besar bukti menunjukkan bahwa hubungan sebab akibat tidak berjalan dari suku bunga ke pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih cenderung dari pertumbuhan ekonomi ke suku bunga; (3) temuan berlaku juga untuk periode sebelum krisis 2008. Hasilnya berlaku untuk ekonomi pasar industri dan negara berkembang. Ini berarti bahwa kebijakan moneter yang dibatasi untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga tidak dapat efektif dalam menggerakkan perekonomian ke arah yang diklaim, dan ini dapat menjadi hasil umum yang berlaku tidak hanya pada situasi pasca krisis.

Penelitian yang dilakukan ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ascarya (2012) dalam penelitiannya yang berujuan untuk melihat sejauh mana suku bunga bank konvensional bergerak mengikuti suku bunga kebijakan dalam jangka panjang maupun jangka pendek terhadap sasaran akhir pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hasil yang diperoleh ialah suku bunga berpengaruh negatif terhadap output atau pertumbuhan ekonomi dikarenakan adanya kenaikan pada tingkat suku bunga maka akan menurunkan tingkat investasi akibat biaya modal yang dikeluarkan terlalu tinggi.

Pengaruh kredit atau simpanan (LOAN) dan suku bunga (INT) terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara

Instrumen transmisi kebijakan moneter konvensional diantaranya ada suku bunga (INT) dan kredit atau pinjaman (LOAN). Dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa transmisi kebijakan moneter konvensional (kredit atau pinjaman (LOAN) dan suku bunga (INT)) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara yang ditunjukkan dengan hasil uji F. Nilai probabilitas *F-statistic* sebesar 0,000009. Angka tersebut < (lebih kecil) dari 0,05 atau *F-statistic* (13,43691) > (lebih besar) dari F_{tabel} (2,49), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, yang menunjukkan bahwa variabel transmisi kebijakan moneter konvensional (kredit atau pinjaman (LOAN) dan suku bunga (INT)) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Menurut teori, kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (biasanya bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Arti yang lebih luas kebijakan moneter adalah semua upaya atau tindakan Bank Sentral dalam mempengaruhi perkembangan variabel moneter (uang beredar, suku bunga, kredit dan nilai tukar) untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, maka tujuan kebijakan moneter adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, stabilitas harga dan keseimbangan neraca pembayaran. Keempat sasaran tersebut merupakan tujuan akhir kebijakan moneter. (Nopirin, 2014).

Transmisi kebijakan moneter merupakan jalur-jalur (*channels*) yang dilalui oleh suatu kebijakan moneter hingga dapat mempengaruhi tujuan akhir kebijakan moneter. Mekanisme transmisi

kebijakan moneter yang standar dimulai dari tindakan bank sentral melalui perubahan (*shock*) instrumen kebijakan moneter. Tindakan ini kemudian mempengaruhi sasaran operasional (*operational target*) dan sasaran antara (*intermediate target*) yang pada akhirnya mempengaruhi tujuan akhir kebijakan moneter (*final target*). (Warjiyo, 2004).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ascarya (2012a) oleh yang menjelaskan bahwa uji kasalitas Granger, secara keseluruhan, alur transmisi kebijakan moneter konvensional sesuai dengan teori. Artinya bahwa transmisi kebijakan moneter konvensional berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

Pengaruh pembiayaan syariah (FINC) terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara

Dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pembiayaan syariah (FINC) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara yang ditunjukkan dengan asil uji t. Koefisien dari variabel pembiayaan syariah (FINC) yang terdapat pada tabel 4.9 sebesar -6,99 yakni bernilai negatif. Artinya arah pembiayaan syariah (FINC) terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) adalah negatif. Hal ini menggambarkan bahwa jika pembiayaan syariah (FINC) meningkat sebanyak 1 satuan maka pertumbuhan ekonomi (PDRB) akan menurun sebesar 6,99 kali.

Teori Schumpeter menyatakan bahwa *Demand-following* dan *Supply-leading view* menunjukkan bahwa sektor keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi. *Demand-following* adalah fenomena ketika pembentukan institusi finansial modern, aset dan liabilitas, dan berbagai jasa keuangan adalah sebagai respon dari meningkatnya permintaan jasa keuangan oleh para investor dan penabung dalam sektor riil.

Product Domestic Bruto (PDB) sebagai indikator pertumbuhan ekonomi di Indonesia didorong dan bersumber dari beberapa sektor. Salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah pasar keuangan melalui mobilisasi sumber daya keuangan dan arus modal atau investasi. Ayyubi (2018) menyatakan pada pengelolaan perekonomian makro, terjadinya peningkatan penggunaan produk dan instrumen keuangan Syariah mendorong adanya hubungan antara sektor keuangan Syariah dengan sektor riil. Hal ini terjadi melalui proses peran keuangan syariah sebagai pendanaan jangka panjang dalam suatu perekonomian dan menciptakan keharmonisan di antara keduanya yang pada akhirnya mendorong penciptaan kekayaan negara yang berdampak pada PDB. Semakin luas penggunaan produk dan instrumen Syariah, mendukung kegiatan keuangan dan juga mengurangi transaksi-transaksi spekulatif. (El Ayyubi, Anggraeni, & Mahiswari, 2018).

Hal ini didukung dari data perkembangan pembiayaan syariah yang mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Namun pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Sumatera Utara justru menurun dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Hal ini berarti apabila terjadi kenaikan pada total pembiayaan maka dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya hal ini bertentangan dengan yang seharusnya, karena pada dasarnya pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah langsung ke sektor riil. Namun, faktanya saat ini *market share* perbankan syariah masih sangat kecil, yaitu 3,2% belum bisa bersaing dengan bank konvensional yang telah berdiri lebih lama dari bank syariah. Selain itu, masih mendominasinya produk *murâbahah* di bank syariah daripada produk kerja sama, *mudhârabah* dan *musyâarakah*.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nofrianto, Muliana, & Cahyadi (2021) yang mengatakan bahwa, sementara itu, pembiayaan bank syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, dalam jangka panjang, hal itu berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asnuri, (2015) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari total pembiayaan dalam perbankan syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan hasil pengujian *Error Correction Model* (ECM) yang diperoleh ialah total pembiayaan dalam jangka panjang memiliki pengaruh dan berkontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena terdapat ketidaksinambungan pada total pembiayaan syariah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa hasil estimasi jangka panjangnya menunjukkan tingkat probabilitas kurang dari Alpha 0,05 maka residual dari persamaan telah stasioner pada derajat integrasi nol atau I (0), sehingga variabel FINC dapat dikatakan terkointegrasi atau terdapat indikasi hubungan jangka panjang. Terdapat ketidaksinambungan pada pembiayaan perbankan syariah (FINC) dalam mempengaruhi output dikarenakan pada periode 2011 – 2018 jumlah pembiayaan perbankan syariah (FINC) masih sedikit. Jumlah pembiayaan perbankan syariah (FINC) selalu lebih rendah dari pembiayaan *mudharabah + musyarakah* perbankan syariah yang terdapat pada instrumen PLS (*profit loss sharing*). Hal ini bisa disebabkan oleh tingkat imbal hasil PLS yang lebih tinggi dari tingkat imbal hasil pada FINC. Porsi pembiayaan *murabahah* yang lebih banyak dibandingkan dengan *mudharabah* dan *musyarakah*. Inilah yang menyebabkan pembiayaan bank syariah dalam jangka panjang berpengaruh negatif. Tingginya pembiayaan *murabahah* akan membuat masyarakat lebih konsumtif. Lain halnya dengan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang menunjukkan adanya aktivitas usaha yang dilakukan, sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya akan menaikkan pendapatan masyarakat. Ketika pendapatan masyarakat naik dan stabil akan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat dan mendorong pertumbuhan industri dalam menciptakan barang dan jasa. Kemudian berlangsung secara berkelanjutan, karena masyarakat mempunyai aktivitas usaha dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang akhirnya akan menaikkan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abduh & Azmi Omar (2012) yang mengatakan bahwa dalam jangka panjang, perkembangan keuangan Islam berkorelasi positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara pembiayaan syariah dan pertumbuhan di Indonesia bersifat dua arah yang menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah mendorong pertumbuhan dan pada saat yang sama pertumbuhan mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Pengaruh tingkat bagi hasil (PLS) terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara

Dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil (PLS) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara yang ditunjukkan dengan hasil uji t. Koefisien dari variabel tingkat bagi hasil (PLS) yang terdapat pada tabel 4.9 sebesar 0,02 yakni bernilai positif. Artinya tingkat bagi hasil (PLS) terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) adalah positif. Hal ini menggambarkan bahwa jika tingkat bagi hasil (PLS) meningkat sebanyak 1 satuan maka pertumbuhan ekonomi (PDRB) akan naik sebesar 0,02 kali.

Teori mengatakan kebijakan moneter untuk 'pengurangan inflasi' dengan pola syariah lebih efektif daripada pola konvensional. Variabel konvensional yang utamanya adalah sektor finansial, secara alamiah memicu inflasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel syariah yang utamanya adalah sektor riil, secara alamiah tidak memicu inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. (Ascarya, 2012). Hal ini didukung dari data perkembangan *profit loss sharing* (PLS) atau bagi hasil pembiayaan (Mudharabah dan Musyarakah) terus mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Begitu juga pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Sumatera Utara menurun dari tahun 2015 sampai tahun 2021.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masrizal & Trianto (2022) yang mengatakan bahwa, menerapkan pendekatan ARDL untuk memodelkan jangka panjang dan jangka pendek, menemukan kontribusi positif dari skema pembiayaan PLS terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Membandingkan pembiayaan PLS dan non-PLS, kami mencatat bahwa pembiayaan PLS memiliki dampak pertumbuhan yang lebih besar, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, agar keuangan syariah memiliki dampak pertumbuhan yang lebih besar, langkah dan inisiatif konkret harus dilakukan untuk meningkatkan pembiayaan syariah berdasarkan pengaturan PLS. Penelitian yang dilakukan ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ghofur Wibowo dan Ahmad Mubarak (2017) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisa efektifitas mekanisme transmisi ganda. Dengan hasil uji yang diperoleh *profit loss sharing* (PLS) sebagai instrumen moneter di Indonesia tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Pembiayaan Syariah (FINC) dan Tingkat Bagi Hasil (PLS) terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara

Instrumen transmisi kebijakan moneter syariah diantaranya ada suku pembiayaan syariah (FINC) dan *Profit Loss Sharing* (PLS). Dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa transmisi kebijakan moneter syariah (pembiayaan syariah (FINC) dan *profit loss sharing* (PLS)) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara yang ditunjukkan dengan hasil uji F. Nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,000000. Angka tersebut < (lebih kecil) dari 0,05 atau F-statistic (107,4615) > (lebih besar) dari F_{tabel} (2,49), sehingga H₀ ditolak dan H_a diterima, yang menunjukkan bahwa variabel transmisi kebijakan moneter syariah (pembiayaan syariah (FINC) dan *profit loss sharing* (PLS)) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Menurut teori, kebijakan moneter syariah berperan sebagai penyokong sektor riil. Untuk mencapai tujuan tersebut, uang dan lembaga perbankan adalah dua bagian terpenting yang harus digunakan untuk mencapai tujuan pencapaian kebijakan moneter syariah. Namun perkembangan teori moneter Islam selanjutnya juga belum ada yang menyinggung tentang transmisi kebijakan moneter Islam, termasuk *pass-through* atau jalur-jalurnya. (Siddiqui, 1980). Salah satu pionir pengembang teori ekonomi moneter Islam kontemporer adalah Muhammad Umer Chapra dengan bukunya *Towards a Just Monetary System*, institusi keuangan Islam kontemporer tidak jauh berbeda dengan *setting* institusi keuangan konvensional yang sudah mapan, sehingga instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam juga banyak yang mirip dengan instrumen-instrumen kebijakan moneter konvensional. Namun, karena cara kerja instrumen kebijakan moneter Islam memiliki persamaan dan perbedaan prinsip dengan cara kerja instrumen kebijakan moneter konvensional, transmisi kebijakan moneter Islam

dapat sama atau berbeda dengan transmisi kebijakan moneter konvensional (Sugianto, Harmain, & Harahap, 2015).

Chapra (1985) mengatakan, kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai sosio ekonomi Islam. Antara lain yaitu: (a) Kesejahteraan ekonomi secara luas dengan berlandaskan full employment dengan tingkat pertumbuhan optimum; (b) Keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan, salah satunya dapat dilakukan dengan mekanisme zakat yang baik dan benar; (c) Stabilitas nilai uang sehingga benar-benar menjadi *medium of exchange* yang benar-benar adil dan stabil; (d) Mobilisasi dan investasi modal untuk pembangunan ekonomi yang produktif dengan sistem pembagian yang adil untuk semua pihak yang terlibat; (e) Mewujudkan jasa-jasa lain, seperti pasar primer dan sekunder untuk memenuhi kebutuhan akan pendanaan dan keuangan yang non *inflationary* untuk pemerintah. (Chapra, 1985).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo & Mubarak (2018) yang menyimpulkan bahwa variabel jalur syariah yaitu pembiayaan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Variabel bagi hasil dan SBIS tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Variabel jalur konvensional yang terdiri dari total kredit dan SBI tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel suku bunga kredit efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuadi, Suriani, & Zulham, (2022) yang menyimpulkan bahwa dengan pendekatan Augmented Dickey-Fuller Stationary (ADF) dalam jangka pendek variabel pembiayaan bank syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian, hasil estimasi uji terikat menunjukkan adanya hubungan ekuilibrium jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka panjang suku bunga jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan pembiayaan bank syariah, reksa dana dan syariah saham tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Kredit atau Pinjaman (LOAN), Suku Bunga (INT), Pembiayaan Syariah (FINC) dan Tingkat Bagi Hasil (PLS) terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Dari hasil penelitian, secara simultan dapat dilihat pada tabel 1. bahwa kredit atau pinjaman (LOAN), suku bunga (INT), pembiayaan syariah (FINC) dan tingkat bagi hasil (PLS) secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Diketahui bahwa nilai probabilitas *F-statistic* sebesar 0,00000. Angka tersebut <(lebih kecil) dari 0,05 atau *F-statistic*(462,0617) > (lebih besar) dari $F_{tabel}(2,33)$, yang menunjukkan bahwa variabel kredit atau pinjaman (LOAN), suku bunga (INT), pembiayaan syariah (FINC) dan tingkat bagi hasil (PLS) secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Menurut teori, kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (biasanya bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Arti yang lebih luas kebijakan moneter adalah semua upaya atau tindakan Bank Sentral dalam mempengaruhi perkembangan variabel moneter (uang beredar, suku bunga, kredit dan nilai tukar) untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, maka tujuan kebijakan moneter adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, stabilitas harga dan keseimbangan neraca pembayaran. Keempat sasaran tersebut merupakan tujuan akhir kebijakan moneter. (Nopirin, 2014). Transmisi kebijakan moneter merupakan jalur-jalur (*channels*) yang dilalui oleh suatu kebijakan moneter hingga dapat

mempengaruhi tujuan akhir kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter yang standar dimulai dari tindakan bank sentral melalui perubahan (*shock*) instrumen kebijakan moneter. Tindakan ini kemudian mempengaruhi sasaran operasional (*operational target*) dan sasaran antara (*intermediate target*) yang pada akhirnya mempengaruhi tujuan akhir kebijakan moneter (*final target*). (Warjiyo, 2004).

Menurut teori, kebijakan moneter syariah berperan sebagai penyokong sektor riil. Untuk mencapai tujuan tersebut, uang dan lembaga perbankan adalah dua bagian terpenting yang harus digunakan untuk mencapai tujuan pencapaian kebijakan moneter syariah. Namun perkembangan teori moneter Islam selanjutnya juga belum ada yang menyinggung tentang transmisi kebijakan moneter Islam, termasuk *pass-through* atau jalur-jalurnya. (Siddiqui, 1980).

Salah satu pionir pengembang teori ekonomi moneter Islam kontemporer adalah Muhammad Umer Chapra dengan bukunya *Towards a Just Monetary System*, institusi keuangan Islam kontemporer tidak jauh berbeda dengan *setting* institusi keuangan konvensional yang sudah mapan, sehingga instrument-instrumen kebijakan moneter Islam juga banyak yang mirip dengan instrumen-instrumen kebijakan moneter konvensional. Namun, karena cara kerja instrumen kebijakan moneter Islam memiliki persamaan dan perbedaan prinsip dengan cara kerja instrumen kebijakan moneter konvensional, transmisi kebijakan moneter Islam dapat sama atau berbeda dengan transmisi kebijakan moneter konvensional (Sugianto et al., 2015).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu telah mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain kredit atau pinjaman (LOAN), suku bunga (INT), pembiayaan syariah (FINC) dan tingkat bagi hasil (PLS).

KESIMPULAN

Kami dapat memberikan kesimpulan antara lain: Kredit dan simpanan (LOAN) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Sumatera Utara. Suku bunga (INT) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Sumatera Utara. Kredit atau Pinjaman (LOAN) dan Suku Bunga (INT) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Pembiayaan syariah (FINC) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Sumatera Utara. Tingkat bagi hasil (PLS) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Sumatera Utara. Pembiayaan Syariah (FINC) dan Tingkat Bagi Hasil (PLS) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Kredit atau pinjaman (LOAN), suku bunga (INT), pembiayaan syariah (FINC) dan tingkat bagi hasil (PLS) secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Beberapa rekomendasi kebijakan diantaranya: penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan informasi bagi pihak Bank Indonesia untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengaruh transmisi kebijakan moneter melalui sistem moneter konvensional maupun syariah yang kedepannya dapat mempengaruhi sektor riil. Selanjutnya pada perusahaan bank syariah di Sumatera Utara agar memahami tentang mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan dengan tujuan agar dapat berkesinambungan dengan jalur suku bunga yang diterapkan dalam transmisi kebijakan moneter konvensional, sehingga secara bersama-sama dapat memberikan pengaruh atau dampak pada pertumbuhan sektor riil.

Perlunya strategi ekonomi yang dapat meningkatkan volume transaksi berbasis syariah dan semakin memurnikan sistem ekonomi syariah, sehingga diharapkan persentase andil ekonomi syariah

dalam pertumbuhan ekonomi akan semakin besar mengingat potensinya yang besar dan seperti yang telah diketahui bahwa ekonomi syariah merupakan ekonomi yang bebas riba sehingga tahan atas ketidakstabilan ekonomi. Selain dengan melakukan seminar bagi mereka yang memang tertarik dengan dunia ekonomi syariah, salah satu yang dapat dilakukan oleh para pelaku ekonomi yang sudah mengerti bagaimana ekonomi syariah berjalan guna menyebarluaskan informasi pengetahuan mengenai ekonomi syariah adalah dengan mengajak juga mendatangi langsung atau “menjemput” para pelaku ekonomi yang belum mengerti dan tahu tentang kelebihan ekonomi syariah, sehingga masyarakat akan semakin mengerti bagaimana ekonomi syariah berjalan dan menghilangkan anggapan bahwa ekonomi syariah hanyalah sebuah sistem ekonomi yang “menyariahkan” sistem ekonomi konvensional yang biasa dipakai.

Daftar Pustaka

- Abduh, M., & Azmi Omar, M. (2012). Islamic banking and economic growth: the Indonesian experience. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(1), 35–47.
- Andhiani, K. D., Erfit, & Bhakti, A. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1).
- Ascarya. (2012). Alur Transmisi Dan Efektifitas Kebijakan Moneter Ganda di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 283–315.
- Ascarya, A., & Bayuni, E. M. (2010). Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Terhadap Stabilitas Besaran Moneter Dalam Sistem Moneter Ganda Di Indonesia. *Islamic Finance & Business Review*, 5(1).
- Asnuri, W. (2015). Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 5(2).
- Batubara, N. F. (2022). Tumbuh 3,90 Persen Triwulan I 2022, Perekonomian Sumut Tertinggal dari Jambi dan Riau.
- Budiyanto, V., & Wibowo, W. (2021). Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Negara Indonesia). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3).
- Chapra, M. U. (1985). *Towards a Just Monetary System*. Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- Dwiastuti, N. (2020). Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 73–92.
- El Ayyubi, S., Anggraeni, L., & Mahiswari, A. D. (2018). Pengaruh Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Al-Muzara'ah*, 5(2), 88–106.
- Elvalisa Siregar. (2022). BI: Sumut Penyumbang ke-2 terbesar pertumbuhan ekonomi Sumatera.
- Fuadi, M., Suriani, S., & Zulham, T. (2022). Can Sharia Finance Affect Indonesia's Economic Growth? *International Journal of Finance, Economics and Business*, 1(3), 166–176.
- Halim, M. A. (2018). *Teori Ekonomi Makro* (Edisi 3). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hendra Andy Mulia Panjaitan, Sri Mulatsih, & Wiwiek Rindayati. (2020). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 8(1), 43–61.
- Hubara, Z. A., Nurrahma, S. A., & Jannah, N. (2021). Penerapan Kebijakan Moneter Islam Pada Sistem Perekonomian Indonesia. *Journal Of Managrment, Accounting, Economic and Business*, 2(4).
- K, Y., S, E., H.A, Y., & NST, M. (2020). *Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2020*. Medan: Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Kalsum, U. (2016). Sistem Moneter Islam Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia. *Edisi Janusari*, 9(1).
- Kunawangsih Pracoyo, T., & Pracoyo, A. (2007). *Aspek Dasar Ekonomi Makro Di Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.
- Latifah, N. A. (2015). Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi MODERNISASI*, 11(2), 124.
- Lee, K. S., & Werner, R. A. (2022). Are lower interest rates really associated with higher growth? New empirical evidence on the interest rate thesis from 19 countries. *International Journal of Finance and Economics*, (June 2020), 1–16.
- Manan, H. A. (2014). *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta.

- Masrizal, & Trianto, B. (2022). the Role of Pls Financing on Economic Growth: Indonesian Case. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(1), 49–64.
- Nofrianto, N., Muliana, Y., & Cahyadi, A. (2021). The Impact of Islamic Bank Financing, Government Spending, and Investment on Economic Growth in Indonesia. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 10(2), 299–310.
- Nopirin. (2014). *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro-Makro*. Yogyakarta: BPFE.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Potensi Pertumbuhan Ekonomi ditinjau dari Penyaluran Kredit Perbankan kepada Sektor Prioritas. *Otoritas Jasa Keuangan*, 58. Retrieved from [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Potensi-Pertumbuhan-Ekonomi-ditinjau-dari-Penyaluran-Kredit-Perbankan-Kepada-Sektor-Prioritas/Kajian-Kredit - Pertumbuhan Eko \(final\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Potensi-Pertumbuhan-Ekonomi-ditinjau-dari-Penyaluran-Kredit-Perbankan-Kepada-Sektor-Prioritas/Kajian-Kredit-Pertumbuhan-Eko-final.pdf)
- Prihatin, W. A., Arintoko, A. A., & Siharno, S. S. (2019). Analisis Pengaruh Variabel-Variabel Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 21(3).
- Pujoalwanto, B. (2014). *Perekonomian Indonesia; Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siddiqui, S. A. (1980). *An Evaluation of Research on Monetary Policy and Stability of the Islamic Economic system*. 235–270.
- Siti Ombun Harahap, & Harahap, Z. A. A. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara Periode 2012-2016*. 6(2), 102.
- Soemitra, A. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: Kencana.
- Sugianto, Harmain, H., & Harahap, N. (2015). Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia Melalui Sistem Moneter Syariah. *Human Falah, Vol.2*(No. 1).
- Sukirno, S. (2019). *Makroekonomi: Teori Pengantar* (3rd ed.). Depok: Rajawali Pers.
- Sukmana, R., & Kassim, S. H. (2010). Roles of the Islamic banks in the monetary transmission process in Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(1), 7–19.
- Tambunan, K., & Nawawi, M. I. (2017). Analisis Kausalitas Granger Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Perekonomian Indonesia. *BISNIS*, 5(2).
- Warjiyo, P., & Solikin. (2004). *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia*. (Buku Seri). Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK). Bank Indonesia.
- Warjiyo, P. (2004). *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPAK) BI.
- Wibowo, M. G., & Mubarak, A. (2018). Analisis Efektivitas Transmisi Moneter Ganda Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 25(2), 127–139.